

PENGARUH SISKEUDES, SPIP, KOMPETENSI APARAT, PARTISIPASI MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Erlitawati Kaharudin*

Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Semarang

e-mail: erlita@aeterbang.ac.id

*author correspondence

Abstrak

Pemerintah menekankan pembangunan pedesaan sebagai langkah awal Pembangunan, dimana desa yang kaya dan terkelola dengan baik diharapkan dapat mendorong pembangunan manusia. Hibah pedesaan yang diberikan oleh APBN bertujuan untuk mendorong pembangunan desa dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Siskeudes, SPIP, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada anggota BPD di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan SPIP, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan implementasi Siskeudes untuk memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, perlu adanya peningkatan kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat agar dapat berkontribusi lebih efektif dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *siskeudes; spip; kompetensi; partisipasi, akuntabilitas*

Abstract

The government emphasizes rural development as the first step in development, where rich and well-managed villages are expected to encourage human development. Rural grants provided by the APBN aim to encourage village development by increasing accountability in managing village funds through the village financial system (Siskeudes) and the Government Internal Control System (SPIP). This research aims to analyze the impact of Siskeudes, SPIP, competency of village officials, and community participation on accountability in managing village funds. The research method uses a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to BPD members in Limbangan District, Kendal Regency. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with the SPSS program. The results of the research show that Siskeudes has a positive influence on accountability in village fund management, while SPIP, competency of village officials and community participation do not have a significant influence. This research recommends increasing the implementation of Siskeudes to strengthen accountability and management of village finances. Meanwhile, there is a need to increase the competence of village officials and community participation so that they can contribute more effectively to village financial management.

Keywords: *siskeudes; spip; competency; participation; accountability*

PENDAHULUAN

Pada saat ini, pemerintah menganggap pembangunan pedesaan sebagai tahap pertama pembangunan. Mendorong desa kaya dan terkelola dengan baik akan mendorong pembangunan manusia. Pemerintah membagikan pendapatan desa dari dana APBN, dimana pemerintah menerapkan peraturan keuangan desa untuk meningkatkan penggunaan dana desa. Hibah pedesaan adalah hibah yang diberikan oleh APBN kepada daerah pedesaan

untuk mendorong pembangunan desa. Tanggung jawab desa adalah mengelola kekayaan desa dan menyelenggarakan kegiatan desa untuk mencapai kesejahteraan desa.

Pemerintah pusat menyediakan dana pembiayaan perumahan di pedesaan untuk meningkatkan biaya pembangunan, operasional, dan pemberdayaan (Aprilya & Fitria, 2020). Tata kelola dan pengelolaan aset desa yang baik akan memberikan informasi yang akurat, komprehensif dan tepat sehingga menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik dan kuat. Akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengelolaan perekonomian desa, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam menyikapi pekerjaan yang dilakukan sehingga merangsang perkembangan pemerintahan.

Keberadaan rumah menjadi penting karena kegunaan rumah yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal manusia sekaligus menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga serta saudara (Asih Kuswardinah, 2019). Pemerintah sudah banyak mengirimkan uang ke desa, maka pemerintah juga harus mewajibkan desa untuk mengelola uang tersebut dengan baik. Pemerintah juga menganut prinsip akuntabilitas untuk mengelola kegiatan perekonomian desa, dengan meminta pertanggung jawaban dinas pemerintahan di desa untuk mencapai pengelolaan perumahan yang baik. Tanggung jawab pengelolaan aset desa banyak faktor, antara lain penggunaan rencana pendapatan desa (Siskeudes), rencana pengelolaan investasi pemerintah (SPIP), pengetahuan pemilik kekayaan perumahan, dan keterlibatan anggota desa.

Siskeudes merupakan sistem keuangan desa. Siskeudes merupakan alat yang membantu pemerintah daerah mengelola, melaksanakan, mengelola, melaporkan dan memperhitungkan biaya komputer (Juardi et al., 2018). Siskeudes bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa. Siskeudes menggunakan pendekatan akuntansi dan logika untuk menghitung seluruh biaya desa. Salah satu tujuan perencanaan keuangan internal organisasi adalah untuk memelihara informasi keuangan.

Partisipasi manusia berperan untuk menyukkseskan kemajuan suatu wilayah. Warga desa tidak hanya harus memikirkan pembangunan saja, namun juga harus mengenali permasalahan dan bencana yang ada di masyarakat atau desa tersebut. Komunitas juga penting dalam konteks ini, tanpa layanan sosial, pembangunan dan layanan yang mencerminkan permasalahan dan kekuatan komunitas (Pahlawan dkk, 2020). Tanggung jawab yang mempengaruhi keberhasilan dan pengembangan program pedesaan. Masyarakat dilibatkan tidak hanya untuk memikirkan pembangunan tetapi juga untuk mengidentifikasi permasalahan dan bahaya yang ada di masyarakat atau desa. Dalam konteks ini, komunitas juga penting dan tidak ada layanan sosial, pembangunan, dan kegiatan apa pun yang dapat mencerminkan permasalahan dan kekuatan yang ada di komunitas (Pahlawan dkk, 2020).

Penelitian kali ini merujuk penelian dari Afriansyah (2020), yang meneliti pada anggota BPD di Desa Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Adapun perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah menambah variabel yaitu kompetensi aparat pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat yang mengacu pada penelitian Apriliya & Fitria, (2020). Penelitian sebelumnya menggunakan populasi seluruh desa di Kendal, Jawa Tengah. Sementara pada penelitian ini menggunakan populasi anggota BPD di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Sistem Keuangan Desa

Program KPR merupakan keberhasilan kemitraan antara pemerintah pusat, BPKP. KPK juga menyoroti penggunaan siskeudes serta meminta pemilik desa di Indonesia untuk mengetahui lebih jauh penggunaan siskeudes. Ketahui pendapatan desa anda. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah masuk ke dalam sistem. Dengan cara ini, pengguna siskeudes dapat menghemat waktu dan uang dalam pengelolaan data serta

mengurangi risiko penipuan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan elektronik (Afriansyah, 2020)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian internal mencakup rencana organisasi untuk memelihara atau melindungi aset dan menyediakan informasi yang tepat. Peran pemerintah desa adalah mendukung masyarakat dengan memberikan laporan keuangan kepada masyarakat dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pengendalian ini dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kinerja internal organisasi ini menjadi rekomendasi penerapan sistem manajemen manajemen kesetaraan terjemahan. Komponen SPIP adalah:

1. Lingkungan operasi, merupakan seluruh unit operasi dasar yang membentuk infrastruktur
2. Praktik manajemen, merupakan kegiatan, metode, kebijakan, prosedur untuk mengatasi masalah bisnis yang teridentifikasi.
3. Penilaian risiko adalah proses penilaian risiko terjadinya peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan dan inisiatif pemerintah.

Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa

Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang membuat seseorang lebih jernih dari pada pikiran. Dengan mengidentifikasi jenis pengetahuan dan keterampilan pribadi yang diperlukan untuk pekerjaan itu, seseorang akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan standar teknis tertinggi (Kompri, 2017). Menurut UU no. Ayat 2 Pasal 233, perubahannya menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah meliputi pengetahuan, gagasan, dan keterampilan terkait dengan kebijakan zonasi, hubungan antar negara, pengelolaan perekonomian daerah, dan lain-lain. Keterampilan umum mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Sekarang, pengetahuan dapat didefinisikan sebagai jumlah pengetahuan, keterampilan dan kualitas seseorang. Kekuasaan tuan desa dapat dicapai melalui pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. Dalam rangka mendorong pembangunan desa sehat, kemampuan tersebut dinilai penting dalam berbagai kegiatan. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu (Umaira & Adnan, 2019).

Partisipasi Masyarakat

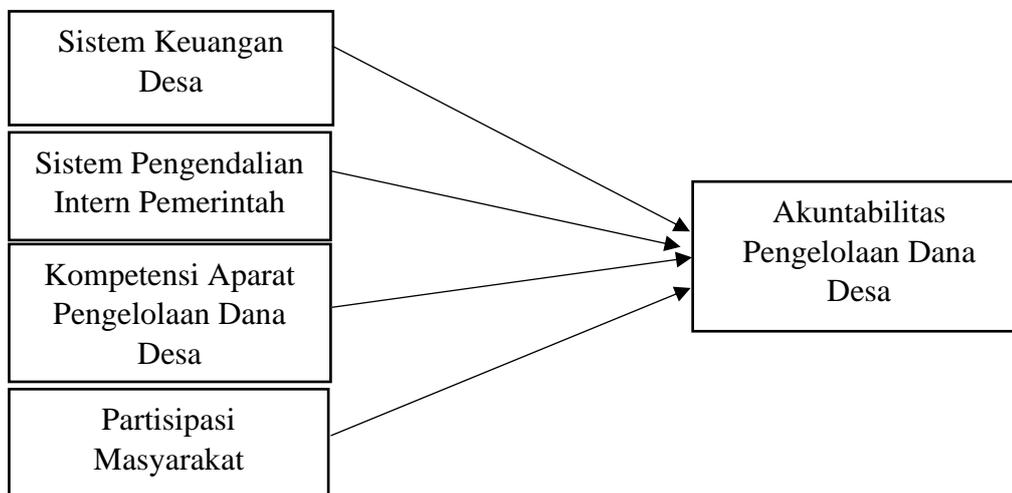
Partisipasi masyarakat penting bagi pemerintah untuk mengelola pendapatan desa. Manusia mengetahui bagaimana melakukan interaksi sosial dalam keadaan tertentu. Partisipasi masyarakat juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi permasalahan dan risiko yang ada di masyarakat. Dalam kegiatan tersebut masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mencari solusi yang berbeda, mengatasi permasalahan dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Menurut Cohen dalam Naimah (2017), ada banyak jenis peluang antara lain: (1) harus ada peluang untuk mengambil keputusan berdasarkan ide atau kepentingan bersama untuk memastikan keberhasilan pembangunan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan merupakan tanggung jawab masyarakat untuk melaksanakan program, termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta perencanaan dan pelaksanaan program; (3) harus ada akses terhadap manfaat, tergantung pada kualitas dan kuantitas hasil. Sedangkan kualitas, seperti peningkatan produksi, kualitas, seperti keberhasilan program pengelolaan pendapatan desa; (4) harus ada kesempatan untuk memantau kemajuan proyek, yang berarti memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Dewi & Gayatri (2019) akuntabilitas adalah konsep dimana masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan menunjukkan adanya proses keuangan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan yang ditunjukkan dan dijelaskan oleh DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas adalah tanggung jawab memberikan pertanggungjawaban dan respon terhadap

tindakan pemimpin organisasi. Akuntabilitas adalah nilai, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat atau masyarakat luas. Sifat akuntabilitas Ardiyanti mencakup beberapa aspek akuntabilitas, yaitu: hukum dan kejujuran, tanggung jawab administratif, komitmen proyek, komitmen finansial.

Secara lebih jelas maka Kerangka Pikir Teori, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Teoritis

Berdasarkan kerangka pikir digambar dirumuskan hipotesis di bawah ini:

- a. Sistem keuangan desa berkontribusi terhadap pendapatan dana desa.
- b. Sistem pengelolaan internal pemerintah berdampak positif, pada tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
- c. Dampak positif tenaga keuangan desa, pada pengelolaan keuangan desa.
- d. Partisipasi masyarakat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh variabel-variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terpilih. Penelitian dilakukan di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Populasi merupakan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan karakteristik (Tarjo, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Sampel merupakan bagian populasi dimana punya kesamaan karakteristik dengan populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak (*random sampling*) dengan proses analisis data menggunakan program SPSS (Ghozali, 2006). Sampel yang diambil adalah anggota BPD. Pemilihan desa sebagai sampel berdasarkan *random sampling* dengan mengambil sebanyak 103 responden di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, di mana pengumpulan data ini diambil dari jawaban responden yang diperoleh dari kuesioner yang disebar ke beberapa desa di Kecamatan Limbangan, (diuji dengan uji validitas serta uji reliabilitas). Metode ini memakai skala likert 1-5. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh Siskeudes, SPIP, kompetensi aparat desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Validitas

Uji yang penting dan efisien dapat dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, $R \text{ tabel} < R \text{ hitung}$ maka keputusan tidak sah, namun $R \text{ hitung} > R =$ keputusan sah. Keputusan ini benar.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r-Tabel	Keterangan
VY1	0,465	0,192	Valid
VY2	0,436	0,192	
VY3	0,231	0,192	
VY4	0,374	0,192	
VY5	0,326	0,192	
VY6	0,357	0,192	
SIS1	0,484	0,192	
SIS2	0,384	0,192	
SIS3	0,383	0,192	
SIS4	0,460	0,192	
SPIP1	0,410	0,192	
SPIP2	0,287	0,192	
SPIP3	0,517	0,192	
SPIP4	0,411	0,192	
SPIP5	0,325	0,192	
SPIP6	0,376	0,192	
KAP1	0,379	0,192	
KAP2	0,457	0,192	
KAP3	0,350	0,192	
KAP4	0,467	0,192	
KAP5	0,242	0,192	
PM1	0,526	0,192	
PM2	0,569	0,192	
PM3	0,464	0,192	
PM4	0,464	0,192	

Berdasarkan tabel diatas terlihat perhitungan nilai r variabel Siskeudes (X1), SPIP (X2), kapasitas aparat pengelola keuangan desa (X3), dan partisipasi masyarakat (X4) untuk mengelola pinjaman rumah. Beban (Y) dihitung dari r tabel. Oleh karena itu indeks Siskeudes, SPIP, keahlian petugas pengelolaan keuangan desa dan keterlibatan sosial dianggap benar dan semua nilai hitung $> 0,192$ dihitung dari r tabel, sehingga data dianggap benar semua.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Standar Deviasi	Keterangan
Akuntabilitas (Y)	0,738	0,70	Reliabel
Siskeudes (X1)	0,731	0,70	Reliabel
SPIP (X2)	0,732	0,70	Reliabel
Kompetensi (X3)	0,748	0,70	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,707	0,70	Reliabel

Hasil pengetahuan aparat pengelola keuangan desa dan keterlibatan masyarakat dalam tanggung jawab pengelolaan keuangan desa menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 sehingga dianggap reliabel. Berdasarkan hasil Siskeudes SPIP, aparat pengelola keuangan desa mempunyai reliabilitas dan partisipasi sosial dengan nilai *Croancbach's Alpha* > 0,70.

c. Hasil Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, dilakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Berikut adalah hasil uji normalitas untuk masing-masing variabel:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov (p-value)	Shapiro-Wilk (p-value)
Siskeudes	0.200	0.250
SPIP	0.180	0.230
Kompetensi Aparat Desa	0.150	0.210
Partisipasi Masyarakat	0.220	0.270
Akuntabilitas	0.190	0.240

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal karena p-value dari semua variabel lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, data memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan untuk analisis regresi linier berganda.

d. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model multikolinearitas yang baik adalah yang memenuhi kriteria uji klasik yaitu model harus normal dan model harus bebas multikolinearitas. Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi asumsi pertama, sehingga model ini baik. Model regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan SPSS 21.0 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coeff		Standardized Coeff			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	9,325	2,440			3,821	0,000
Siskeudes	0,430	0,140	0,306		3,074	0,003
SPIP	0,151	0,092	0,164		1,632	0,106
Kompetensi	0,059	0,111	0,054		0,535	0,594
Partisipasi Masyarakat	0,191	0,112	0,181		1,708	0,091

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

Kolom koefisien tidak terstandar (B). Terlihat nilai aktual sebesar 9,325, Siskeudes sebesar 0,430, SPIP sebesar 0,151, kapasitas aparat pengelola keuangan desa = 0,059, partisipasi masyarakat = 0,191. Model persamaan regresi linier berganda berikut dapat dibangun:

$$APDD = \alpha + \beta_1 SIS + \beta_2 SPIP + \beta_3 KAP + \beta_4 PM + e$$

$$APDD = 9,325 + \beta_1 0,430 + \beta_2 0,151 + \beta_3 0,059 + \beta_4 0,191 + e$$

komentar:

1. Nilai positif dari nilai 9,325 sama dengan 0, jadi nilai dari nilai tersebut adalah 9,325.

2. Nilai koef Siskeudes = 0,430, sig = 0,003 < 0,05, jadi memiliki pengaruh positif pada respon pengelolaan pendapatan desa.
3. Nilai SPIP sebesar 0,151 sig 0,106 > 0,05, SPIP tidak bermanfaat untuk pengelolaan perekonomian pedesaan.
4. Nilai keterampilan pengelolaan kekayaan desa sebesar 0,059 dan simbolnya 0,594 > 0,05, artinya keterampilan pengelolaan kekayaan desa tidak memiliki pengaruh pada kinerja pengelolaan kekayaan desa di tingkat desa.
5. Nilai partisipasi masyarakat = 0,191, nilai sig = 0,091 > 0,05, sehingga diketahui partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh pada respon pengelolaan keuangan desa.

e. Hasil Uji T

Uji t untuk uji hipotesis pengaruh suatu variabel independen pada variabel dependen dengan cara menampilkan t hitung variabel dan membandingkannya dengan t tabel. Terlihat dari statistik uji t jika probabilitas positif palsu < 0,05 maka Ho diterima. Apabila probabilitas error > 0,05 Ha ditolak maka tidak terjadi pengaruh secara parsial.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	t-Tabel	Coefficients ^a	
		Sig.t	Keterangan
(Constant)		0,000	
Siskeudes	1,659	0,003	Hipotesis 1 diterima karena sig < 0,05
SPIP	1,659	0,106	Hipotesis 2 ditolak karena sig > 0,05
Kompetensi	1,659	0,594	Hipotesis 3 ditolak karena sig > 0,05
Partisipasi Masyarakat	1,659	0,091	Hipotesis 4 ditolak karena sig > 0,05

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS

1. Nilai signifikansi indeks siskeudes sebesar 0,003 < probabilitas 0,05 artinya hipotesis 1 diterima yaitu siskeudes memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Hipotesis 2 menjelaskan nilai signifikansi SPIP dan nilai indikator 0,106 > probabilitas 0,05, jadi hipotesis 2 ditolak sehingga SPIP tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan pendapatan desa.
3. Hipotesis 3 menjelaskan signifikansi variabel pengelolaan keuangan pertama dengan skor sebesar 0,594 > probabilitas 0,05 sehingga dapat dikatakan hipotesis 3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap kemampuan pelayanan manajer bank prioritas pertama. manajer bank. Kemampuan untuk mengurus pengeluaran desa. Terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Hipotesis 4 menggambarkan pentingnya kebijakan sosial, nilai sig = 0,091 > probabilitas 0,05 maka dapat dikatakan hipotesis 4 ditolak yaitu partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap status administratif.

Pengaruh Siskeudes pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1, maka siskeudes mempunyai pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Juardi et al, (2018), Ardianti & Suartana, (2020) dan Arfiansyah, (2020) menyatakan bahwa siskeudes memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jadi jika siskeudesnya tinggi, akan membuat akuntabilitas dana desanya akan semakin baik dan meningkat. Jika siskeudesnya bagus, akuntabilitas atau pertanggungjawaban dana desa naik.

Siskeudes juga selalu mempermudah aparat desa dalam mengklasifikasikan transaksi dalam kegiatan dana desa, dengan adanya siskeudes mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Siskeudes ini mampu menjadikan akuntabilitasnya membaik seiring dengan pengetahuan tentang sistem keuangan desanya, siskeudes ini juga merupakan suatu sistem keuangan yang dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan dengan baik dan terkomputerisasi. Sehingga siskeudes ini mendukung penyebab terjadinya akuntabilitas atau pertanggungjawaban aparat desa dengan baik terhadap desanya. Siskeudes ini juga merupakan suatu sistem keuangan yang dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan dengan baik dan terkomputerisasi.

Pengaruh SPIP pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan SPIP tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. SPIP dalam kegiatan desa tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pahlawan et al, (2020) melakukan penelitian yang hasilnya sejalan dengan penelitian ini, dimana SPIP tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat diartikan jika tidak adanya pengaruh SPIP pada setiap kegiatan desa maupun pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Jadi baik atau tidaknya sistem pengendalian intern pemerintah tidak memiliki kaitan dengan tinggi rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, baik dari segi internal desa maupun eksternal pengelolaan dana desanya.

Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian hipotesis 3 diperoleh hasil bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Giriani et al, (2021) sejalan dengan penelitian ini dimana kompetensi aparat, pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Baik atau tidaknya pengetahuan, kemampuan serta skil yang dimiliki aparat desa tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desanya, baik berupa tingginya kompetensi pemerintah desa dalam tata kelola desanya baik dari sumber daya manusianya kompetensi ini tidak berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa baik dari segi pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang mereka miliki.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian hipotesis 4 memperlihatkan hasil dimana partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra & Rasmini, (2019), Aprilia & Fitria, (2020), Giriani et al, (2021) menyatakan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Jadi tidak adanya pengaruh partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa maupun pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Partisipasi masyarakat merupakan rakyat yang langsung terlibat pada proses pengidentifikasian masalah serta langsung memilih terlibat dalam menghadapi masalah atau permasalahan, dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses evaluasi yang terjadi di desa maupun di masyarakat. Ada atau tidaknya partisipasi masyarakat dalam menilai dan terlibat langsung dalam pengawasan dalam penganggaran dana desa tidak mempengaruhi akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan laporan anggaran dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang dibahas di atas, maka:

- a. Kualitas pengelolaan perekonomian desa (Siskeudes) yang dilakukan pemerintah desa mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan, perluasan, dan peningkatan perekonomian

- desa. Pemilik rumah yang memiliki keterampilan yang baik seperti pengetahuan, keterampilan, dan etika akan mampu bekerja secara efisien dan efektif setiap saat, sehingga menghasilkan pengelolaan rumah dan pekerjaan yang lebih baik, serta peningkatan tanggung jawab dalam mengelola aset rumah.
- b. SPIP tidak mempengaruhi besar kecilnya tanggung jawab pengelolaan aset desa, karena besar kecilnya SPIP tidak mempengaruhi besarnya tanggung jawab pengelolaan harta desa.
 - c. Kemampuan pengelola keuangan desa tidak memiliki pengaruh pada tanggung jawab pengelolaan keuangan desa karena tingkat pengetahuan profesional yang dimiliki seseorang tidak memiliki pengaruh pada tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
 - d. Partisipasi masyarakat tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan harta desa, begitu pula ada tidaknya anggota masyarakat tidak mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan harta desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, Kartika R., Astri Fitria (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 9, No. 3, e-ISSN: 2460-0585, 1-20.
- Ardianti, P. A., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 839–2851.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Januari-Mei). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Vol. 3, No. 1, Januari-Mei 2020, 3, 67-82
- Asih Kuswardinah, F. P. (2019). Ilmu Kesejahteraan Keluarga. UNNES Press. <http://lib.unnes.ac.id/36226/>
- Citra Kumala Dewi, M. I. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan. Bomba: *Jurnal Pembangunan Daerah* 1(2) (2019) : 57 - 64 ISSN (Cetak): 2657 -2478 E- ISSN (Elektronik): 2715-1026, 57-64.
- Desy Nur Pratiwi, Y. A. (2021). Analisis Penggunaan Siskeudes Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol 20, No.2. 217-223, 183-198.
- Dewi dan Gayatri. 2019.” Faktor – faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26 No: 311-327.
- Enggar Wahyuning Pahlawan, A. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal Volume 2, Number 2, Year 2020*, 162-172.
- Giriani, Madhalena., Neneng, D.,Burhany, D.I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol.1 No.3, June 2021, pp.480-492
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Juardi, M. M. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV, 84–107.
- Kompri. 2017. “Belajar; Faktor-faktor yang Mempengaruhi. Yogyakarta (Media Akademi).
- Naimah. (2017). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Dipublikasikan. Sumatera Utara: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara
- Pahlawan, Enggar Wahyuning. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Jurnal*, Vol. 2, No. 2.
- Putra, I.M.Y.D. dan N.K. Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 28(1): 132-158
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 3, E-ISSN 2581-1002, 471-481.
- Tarjo. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap akuntabilitas Dana Desa. *jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*. Vol. 5, No 2 September 2019, 331-346.